

# PEMANFAATAN POTENSI MASYARAKAT MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT DI DESA LANGENSARI, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN BANDUNG

Ivo Noviana

## ABSTRAK

*Permasalahan kesejahteraan sosial selalu ada dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam suatu lingkungan masyarakat. Beragam potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan dan kemandirian desa mereka, antara lain adanya lembaga atau institusi sosial, serta nilai-nilai yang mendukung pembangunan seperti nilai kebersamaan, gotong royong dan kesetiakawanan. Apabila potensi tersebut tidak dapat dijaga maka akan memudar dan mungkin akan menghilang. Oleh karena itu dibutuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga masyarakat dapat mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di lingkungan mereka.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Dalam Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial ditegaskan bahwa hakikat pembangunan kesejahteraan sosial adalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan.

Tujuan dari pembangunan di bidang kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya setempat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, secara bersama-sama masyarakat dapat menggunakan potensi yang dimilikinya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan lingkungan

sosialnya. Hal ini dapat dicapai apabila masyarakat berperan serta dalam proses pembangunan.

Pembangunan desa sebagai suatu kegiatan yang terus menerus memerlukan adanya penggerak dari dalam masyarakat itu sendiri (*inner will*). Sifat paternalistik, kesetiakawanan dan semangat gotong royong merupakan nilai-nilai yang masih terdapat dalam kehidupan masyarakat di perdesaan dan hal ini juga merupakan potensi yang ada pada masyarakat desa yang saat ini sudah jarang ditemui pada masyarakat perkotaan.

Dalam pembangunan masyarakat terdapat tiga unsur yang sangat penting, yaitu : (1) mengutamakan inisiatif masyarakat; (2) mengutamakan swadaya masyarakat; dan (3) memanfaatkan sumber-sumber dan potensi yang ada di lingkungan setempat. Dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang ada. Namun persoalan yang sering terjadi adalah kadangkala potensi tersebut tidak terkenal dengan baik, sehingga potensi dan sumberdaya yang ada sering kali tidak didayagunakan secara optimal. Oleh karena itu, pengenalan terhadap potensi yang dimiliki masyarakat sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan dalam pemecahan masalah kesejahteraan sosial yang ada.

## B. Permasalahan

Pada dasarnya, masyarakat mempunyai banyak potensi baik dilihat dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya sosial dan budaya. Permasalahannya adalah potensi-potensi apa saja yang terdapat pada masyarakat Desa Langensari dan bagaimana peran serta dari masyarakat untuk pemanfaatan potensi masyarakat Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian :

1. Teridentifikasinya potensi masyarakat Desa Langensari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung.
2. Teridentifikasinya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat Desa Langensari

Manfaat penelitian :

1. Mengembangkan pengetahuan tentang potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten mengenai pentingnya peran serta masyarakat di dalam melakukan pembangunan desa yang berkesinambungan.

## D. Metode Penelitian

Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan bersifat eksploratif. Eksploratif yang dimaksud disini adalah mencari dan menggali persepsi yang ada dan berkembang di masyarakat dengan menggali kenyataan sosial yang ada dan mengkaitkannya dengan budaya yang dimiliki oleh anggota masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung.

## E. Kajian Pustaka

Manusia sebagai makhluk sosial yang secara tidak langsung menjadi anggota masyarakat dalam perjalanan kehidupannya akan selalu dihadapkan pada berbagai macam masalah yang melingkupi dirinya. Masalah yang ada biasanya berupa hal-hal yang berkenaan dengan hambatan-hambatan dalam pencapaian tujuan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Segala kebutuhan tersebut pada dasarnya tidak dapat dipenuhi tanpa harus menggunakan pengetahuannya dan dalam rangka penggunaan pengetahuan tersebut kadangkala manusia mengalami hambatan-hambatan yang tidak dapat dipecahkan dengan pengetahuan yang dimilikinya atau keterbatasan pengetahuan yang ada pada dirinya sehingga menjadikannya sebagai masalah sosial.

Pada umumnya, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat bukan hanya akibat dari adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian. Namun juga sebagai akibat dari permasalahan struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi atau peran serta dari masyarakat dalam membangun lingkungannya. Pembangunan yang diikuti dengan menumbuhkan peran serta masyarakat mampu mengangkat untuk memberikan tempat nyata pada katalis pembangunan (*agent of development*). Menurut Edi Suharto (2005) masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu-sama lain karena mereka saling berbagi identitas kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya berada pada satu tempat atau lokasi yang sama. Sedangkan partisipasi atau peranserta adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka (Britha Mikkelsen, 2001). Menurut Carry J. Lee dalam Jusman Ikandar (1993) ada 3 (tiga) asumsi nilai peran serta, yaitu : (1) setiap warga masyarakat harus berperan serta secara aktif di dalam upaya perubahan masyarakat; (2) peran serta warga masyarakat haruslah seluas mungkin; dan (3) peran serta warga masyarakat itu harus dilaksanakan melalui organisasi-organisasi yang demokratis.

Pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Potensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada pada setiap masyarakat dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya sosial dan budaya. Untuk mempertahankan kehidupannya, masyarakat memanfaatkan dan mengorganisasikan semua sumber daya yang ada, dalam berbagai aktivitas ekonomi, politik, keagamaan, kesenian, gotong royong, dan sebagainya. Pemanfaatan dan pengorganisasian aktivitas inilah yang diistilahkan sebagai lembaga atau institusi sosial. Masyarakat lokal, dan lembaga sosialnya, mengorganisir diri untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat desa masih sulit untuk melakukan hal tersebut di atas karena mereka dililit berbagai keterbatasan, bukan saja modal tetapi juga pengetahuan dan keterampilan. Selain itu juga belenggu adat dan kebiasaan yang ada, seringkali kurang menguntungkan dilihat dari segi kepentingan pembangunan. Selain itu juga, diantara masyarakat desa masih ada yang belum menyadari kemampuan dirinya sendiri, sehingga mereka lebih banyak bergantung kepada orang lain atau pihak lain.

Dalam hubungannya dengan masalah kesejahteraan sosial, masyarakat desa mempunyai beragam lembaga untuk mengatasi masalah tersebut. Ada lembaga sosial yang berfungsi untuk mengatasi masalah kemiskinan, ada pula lembaga lain yang berfungsi untuk masalah moralitas. Dari pemikiran ini diambil kesimpulan bahwa setiap masyarakat mempunyai potensi untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri (*self help*).

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Langensari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dengan luas wilayah 468,12 Ha. Jumlah penduduk Desa Langensari sebanyak 9.932 jiwa

yang terdiri dari 4.951 jiwa laki-laki dan 4.981 jiwa perempuan, dan terdapat 2.779 kepala keluarga (KK) (data tahun 2004). Penduduk usia produktif (15-45 tahun) berjumlah 4.920 jiwa.

Desa Langensari terletak pada jalur pegunungan di sebelah utara kota Bandung. Perbatasan Desa Langensari yaitu sebelah utara Desa Cikole, Desa Cikidang dan Desa Cibogo; sebelah selatan Desa Mekarwangi; sebelah barat Desa Pagarwangi dan Desa Kayuambon; dan di sebelah timur Desa Wangunharja. Orbitasi (jarak antara waktu tempuh dari desa ke kota kecamatan) kurang lebih 3 Km dengan jarak tempuh sekitar 10 menit. Selain itu, Desa Langensari merupakan salah satu jalan menuju ke obyek wisata Maribaya dan penakarun lebah. Hal ini memungkinkan Desa Langensari tidak sepi dari banyaknya wisata lokal, nasional maupun internasional yang berkunjung ke obyek wisata Maribaya tersebut.

Desa Langensari yang berada pada bentang wilayah berbukit dengan suhu rata-rata harian 17 – 22 derajat celcius sangatlah cocok untuk daerah pertanian, terutama untuk produksi hasil pertanian kubis, kentang, tomat, ubi kayu, padi ladang, dan jagung. Memperhatikan kondisi alam yang demikian hampir 39,7% penduduk bekerja sebagai petani dan 21,2% sebagai buruh tani.

Disamping bidang pertanian, masyarakat Desa Langensari juga bekerja pada bidang peternakan antara lain sebagai peternak ayam, sapi, kambing, kuda dan penangkaran buaya.

Kesadaran dari lembaga pemerintahan di Desa Langensari terhadap pentingnya pendidikan bagi warga masyarakatnya sangatlah tinggi. Hal ini terlihat dengan jumlah bangunan sekolah yang ada dan layak pakai yaitu Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 2 buah, SD/ sederajat sebanyak 4 buah, dan SLTP sebanyak 1 (satu) buah. Sedangkan untuk gedung SLTA tidak ada. Hal ini menyebabkan jumlah lulusan SLTA di Desa Langensari sangat rendah yaitu hanya 0,09%.

Memperhatikan ketersediaan sarana pendidikan yang ada, memungkinkan masyarakat untuk mengenyam tingkat pendidikan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Tetapi pada kenyataannya, tingkat kesadaran terhadap pendidikan bagi masyarakat Desa

Langensari masih rendah. Hal ini terlihat dari tingginya jumlah penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD)/ sederajat yaitu 71,16% dan tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ sederajat sebanyak 16,15%. Melihat kondisi ini, pada dasarnya orang tua memandang anak sebagai aset yang dapat membantu perekonomian keluarga karena nilai anak lebih dipentingkan sebagai tenaga kerja produktif. Sehingga pendidikan anak kurang mendapat perhatian (paling tinggi sekelas SD), ini dikarenakan anak lebih difokuskan untuk bekerja baik sebagai buruh bangunan, buruh tani, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran dari masyarakat Desa Langensari terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak mereka.

Data Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2004 tentang Desa Langensari menggambarkan berbagai permasalahan sosial. Menurut data formal, permasalahan kesejahteraan sosial yang ada, masalah fakir miskin/keluarga miskin yang paling menonjol yaitu sekitar 67,58% dibanding masalah sosial lainnya. Akibat dari kemiskinan tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan tingkat pendidikan, dimana sekitar 71,16% hanya tamat Sekolah Dasar (SD).

## B. Potensi Masyarakat

Semangat gotong royong, kebersamaan, maupun tolong menolong masih dapat dijumpai pada masyarakat perdesaan. Hal ini juga masih dijumpai pada masyarakat Desa Langensari. Kepedulian dan gotong royong yang ada pada masyarakat Desa Langensari tidak hanya pada saat kerja bakti menjaga kebersihan dan keamanan desa atau pada saat pembangunan jalan/jembatan, tetapi juga kepedulian dalam membantu warga masyarakat yang kurang mampu. Misalnya saja ada warga masyarakat yang menjadi orang tua asuh bagi warga yang tidak mampu dalam menyekolahkan anaknya atau kepedulian terhadap warga yang sedang ditimpa musibah seperti kematian atau ketika ada warga yang sakit.

Dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Desa Langensari sangat penting memperhatikan peran serta masyarakat setempat, yang diwujudkan melalui berbagai

lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Beragam lembaga kemasyarakatan yang terdapat di Desa Langensari dalam kaitan dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain :

### a. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Langensari di bagi ke dalam 4 (empat) kelompok kerja (Pokja), yaitu:

- POKJA I : bidang pendidikan dan keagamaan
- POKJA II : bidang pemberdayaan perempuan
- POKJA III : bidang lingkungan hidup dan kemasyarakatan
- POKJA IV : bidang kesehatan

POKJA I, untuk bidang pendidikan dilakukan pembinaan bagi remaja putri yang putus sekolah dalam bentuk penyuluhan yang dilakukan sebulan sekali. Sedangkan dalam bidang keagamaan kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan mengaji dan ceramah keagamaan. Dalam setiap pertemuan, anggota pengajian mengumpulkan dana sebesar Rp. 500,-/orang yang digunakan untuk perawatan atau renovasi masjid/mushola dan pemberian bantuan kepada fakir miskin.

POKJA II, untuk bidang pemberdayaan perempuan menekankan kepada pengembangan usaha seperti *home industry* bagi ibu-ibu rumah tangga. Salah satu *home industry* yang berkembang di RW 04 adalah pembuatan kue kering dan kue basah.

POKJA III, untuk bidang lingkungan hidup, pemanfaatan lahan kosong di depan/ belakang rumah menjadi apotek hidup, dimana hasilnya berguna bagi pemilik dan masyarakat yang membutuhkan. Untuk bidang kemasyarakatan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pokja-pokja lain, kegiatannya adalah penyuluhan terhadap masyarakat.

POKJA IV, untuk bidang kesehatan antara lain meliputi posyandu yang dilakukan setiap sebulan sekali dan Keluarga Berencana (KB).

Kegiatan PKK selain diatur dalam Kelompok Kerja (Pokja), juga terdapat berbagai macam kegiatan lainnya yang dimanfaatkan untuk menangani permasalahan sosial, yaitu :

#### 1. Jimpitan

Kegiatan ini merupakan upaya mengumpulkan dana berupa uang sebesar Rp. 1.000,-/bulan dari setiap kepala keluarga (KK) pada minggu pertama (setiap tanggal 5 tiap bulannya). Dana ini digunakan sebagai bantuan untuk warga yang mengalami musibah (seperti sakit dan kematian). Besarnya dana bantuan yang diberikan untuk warga yang sakit sebesar Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-. Sedangkan jika dirawat di rumah sakit dana bantuan yang diberikan sebesar Rp. 50.000,-. Untuk dana bantuan kematian sebesar Rp. 150.000,- bagi keluarga yang ditinggalkan.

Dalam jimpitan ini, warga diharapkan kerelaannya untuk menyumbang, dalam arti tidak ada paksaan bagi warga yang tidak menyumbang pada saat pengambilan dana jimpitan.

#### 2. Arisan

Kelompok arisan dibentuk hampir di tingkat RW dan desa. Biasanya arisan dilakukan sebulan sekali. Dalam arisan ini dilakukan pengumpulan dana untuk mengisi kas RW dari setiap pembayar arisan Rp. 10.000,- diambil Rp. 2.000,- yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, pembangunan desa dan administrasi RW.

#### b. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah organisasi lokal yang diharapkan dapat memotori kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Tetapi pada kenyataannya, kegiatan yang dilakukan LKMD di Desa Langensari hanya berupa pengajian untuk kaum pria dan kegiatan dalam pembangunan dan perenovasian masjid.

#### c. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan organisasi desa yang mempunyai kegiatan antara lain : kegiatan olah raga dan kesenian, melakukan kegiatan sensus (seperti : sensus sosial, sensus ekonomi, dan sensus penduduk) serta kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut, disamping untuk meningkatkan kesehatan dan prestasi remaja, juga bermanfaat untuk membantu pemerintah desa dalam memperbaharui data permasalahan kesejahteraan sosial dan potensi dana kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan struktur organisasi kepengurusan Karang Taruna digambarkan sebagai berikut : Ketua Umum dibantu oleh Ketua I dan II, Sekretaris I dan II, serta beberapa seksi yaitu kerohanian, seksi pendidikan dan latihan, seksi pengabdian masyarakat, seksi lingkungan hidup, seksi pelayanan kesejahteraan sosial, seksi kesenian, seksi hubungan masyarakat, serta seksi usaha. Dalam perjalanannya, Karang Taruna di Desa Langensari belum banyak melakukan kegiatan kesejahteraan sosial sebagaimana tergambar dalam uraian kepengurusan diatas. Walaupun demikian, Karang Taruna sudah ikut berperan dalam rangka mengisi kegiatan remaja di Desa Langensari.

### III. PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP POTENSI YANG ADA

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Langensari untuk membangun desanya sangat besar, baik berupa organisasi masyarakat atau lembaga sosial yang ada maupun masih besarnya rasa kesetiakawanan, kepedulian dan gotong royong. Tetapi, dari potensi yang ada tersebut belum sepenuhnya didayagunakan, khususnya melalui keikutsertaan atau adanya peran serta dari masyarakat untuk membangun. Hal ini tentunya menyebabkan potensi yang ada tidak tergalai dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Namun, seperti umumnya masyarakat desa di dalam tata hidupnya yang bersifat "self centered" artinya masyarakat desa di dalam

menata kehidupannya memusatkan perhatiannya pada kepentingannya sendiri dan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya cenderung untuk mendasarkan pemikirannya pada pengalaman didalam kehidupannya sendiri. Selain itu, berbagai kelemahan yang dimiliki oleh masyarakat desa dan perlu mendapatkan perhatian adalah kurangnya kesadaran akan pendidikan formal dan pengetahuan umum sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat desa untuk mengembangkan dan menciptakan pandangan yang menjangkau ke masa depan. Tidak adanya keberanian dari masyarakat desa untuk mengambil resiko inovasi dan lebih kuat mempertahankan kebiasaan yang dialaminya sejak lama juga menjadikan kendala bagi pengembangan dan pembangunan masyarakat desa. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Langensari, dimana mereka melihat bahwa pendidikan formal tidaklah penting bagi mereka, karena sebagian besar dari tenaga kerja produktif yang ada hanya tamat SD/ sederajat. Mereka pada umumnya melihat dari kebiasaan orang tua mereka, bahwa dengan pendidikan yang rendah atau mungkin sama sekali tidak bersekolah, dapat bertahan hidup dan menghidupi keluarga mereka walau hanya sebagai petani atau buruh tani.

Kuatnya birokrasi di pemerintahan desa, serta tebalnya sifat *paternalistik* tidak menjamin efektifnya pengorganisasian potensi desa untuk membangun. Budaya "rembug desa" perlu dikembangkan lagi, dan untuk mewujudkan peranan dan keterlibatan masyarakat desa didalam membangun desanya, adanya pranata Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang memutuskan dan membahas pembangunan desa dan diharapkan dari wakil-wakil masyarakat yang terlibat didalamnya dapat mengembangkan potensi dan semangat desa, termasuk prakarsa desa untuk menggerakkan desanya sendiri. Desa Langensari sudah mempunyai organisasi lokal yang cukup baik, antara lain PKK, LKMD dan Karang Taruna. Tetapi dalam perjalanannya, dua dari tiga organisasi lokal (LKMD dan Karang Taruna) yang ada, yang diharapkan dapat mengembangkan dan membangun desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk PKK, walaupun banyak kegiatan yang dilakukan baik oleh ibu-ibu maupun remaja putri, terutama

remaja putri yang putus sekolah, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mereka kekurangan tenaga penggerak dalam hal ini tenaga kader (*indigenous worker*). Peranan kader sangatlah penting, karena dengan adanya kader diharapkan dapat menggantikan peranan petugas pembangunan desa dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Kader adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat setempat yang dengan sukarela bersedia ikutserta dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program pembangunan desa. Keengganan masyarakat Langensari untuk terlibat sebagai kader adalah karena ketidakpercayaan diri mereka akibat rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Dengan keterbatasan pengetahuan yang ada, mereka merasa tidak mampu untuk melakukan tugas yang dibebankan pada mereka.

Ketiadaan regenerasi dalam hal pengkaderan juga berlaku di LKMD dan Karang Taruna. Seharusnya, kedua organisasi lokal tersebut dapat menggerakkan dan memberikan semangat kepada warga masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif tetapi pada kenyataannya hanya melakukan hal-hal yang bersifat *insidental*. Karang Taruna misalnya hanya terlibat ketika melakukan sensus penduduk. Begitu juga LKMD yang diharapkan dapat memotori setiap kegiatan di Desa Langensari tidak berjalan dengan semestinya. Yang ada adalah kegiatan LKMD hanya membangun atau merenovasi mesjid. Sama seperti yang terjadi di PKK, ketiadaan pengkaderan di 2 (dua) organisasi lokal ini menyebabkan organisasi ini tidak dapat berjalan sesuai fungsinya.

Namun sebenarnya ada perbedaan yang mendasar antara ketiadaan pengkaderan di PKK dengan Karang Taruna dan LKMD. Jika di PKK kurangnya pengkaderan karena ketidakpercayaan diri dari warga masyarakatnya. Di Karang Taruna dan LKMD ketiadaan pengkaderan ini terjadi karena warga masyarakat malas untuk membangun kembali kedua organisasi lokal tersebut yang sudah "vakum" atau kurang adanya kegiatan. Bagi mereka, sangatlah sulit untuk melanjutkan suatu organisasi yang sudah "tidur" tersebut.

Melihat organisasi lokal yang ada di Desa Langensari, maka patut dipertimbangkan

adalah untuk memfungsikan lembaga-lembaga yang ada (dalam hal ini PKK, LKMD dan Karang Taruna) untuk dapat secara lebih baik mengantisipasi program-program pembangunan. Oleh karena itu, maka sebaiknya dilakukan program-program pelatihan bagi warga Desa Langensari dengan menggunakan peran serta (partisipasi) dari masyarakat yang berlandaskan pada prinsip kebutuhan hidup. Pelatihan (*training*) ini perlu diberikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum mereka melakukan program pembangunan yang diberikan oleh ahli-ahli dari luar desa. Pelatihan tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan maupun keterampilan/keahlian terhadap perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Dengan diikutsertakannya tenaga setempat dalam pelatihan, maka kepercayaan masyarakat atas kemampuannya sendiri bertambah besar, sehingga rasa tanggung jawab terhadap program pembangunan desa bertambah kuat.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang terdapat di dalamnya dalam bentuk potensi masyarakat.

Potensi tersebut dalam bentuk sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya sosial dan budaya.

2. Pemanfaatan terhadap potensi dan sumber yang ada di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan adanya peran serta dari masyarakat, sehingga dapat dilakukan secara optimal.
3. Peranan dari lembaga lokal (PKK, Karang Taruna, dan sebagainya) yang ada sangat penting untuk menggerakkan masyarakat agar berperan aktif didalam memajukan desanya.

##### B. Rekomendasi

1. Matinya suatu lembaga tergantung dari sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu perlu adanya kaderisasi terhadap lembaga-lembaga lokal yang ada sehingga dapat berkembang untuk menunjang pembangunan desa.
2. Perlu adanya program-program pelatihan (*training*) untuk masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga mereka dapat mengolah dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2003, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Adimihardja, Kusnaka & Harry Hikmat, 2003, *Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung; Humaniora Utama Press.
- Jayaputra, Achmadi, 2005, *Kendala Perkembangan Potensi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kawatuna, Kota Palu)*, dalam *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Volume 10 No. 1 April 2005, Jakarta; Puslit PKS Balatbangsos Departemen Sosial RI.
- Mikkelsen, Britha, 2001, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta; Yayasan Obor Indonesia.
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung; Refika Aditama.

Suparlan, Parsudi, 1994, *Pembangunan yang Terpadu dan Berkesinambungan*, Jakarta; Balatbangsos Departemen Sosial RI.

Rudito, Bambang, 2005, *Masalah Sosial Penyebab Kemiskinan*, dalam *Indonesian Journal for Sustainable Future*, Volume 1 No. 1 Juli 2005, Jakarta; ICSD.

**BIODATA PENULIS :**

Ivo Noviana, alumnus Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 1998, Kini sebagai staff bidang Kerjasama dan Publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.